

FAKTOR DOMINAN PENGHAMBAT SERTIFIKASI KOPETENSI DALAM PERSEPSI TENAGA TERAMPIL DI SEKTOR KONSTRUKSI

Irika Widiasanti, Agung Fridestu, Doddy Rochyadi, Anisah

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Negeri Jakarta, 13220

irika@unj.ac.id

Abstrak

Tujuan sertifikasi kompetensi adalah memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Namun, pada sektor konstruksi, tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja masih sedikit dibandingkan dengan jumlah total tenaga kerja konstruksi yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama yang menghambat dalam perolehan sertifikasi kompetensi dalam sudut pandang tenaga kerja konstruksi khususnya tenaga terampil. Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di tiga proyek bangunan tingkat tinggi, dengan jumlah responden 129 orang. Rancangan penelitian yang digunakan dalam bentuk survey dengan metode pengumpulan data melalui kuisioner, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dominan yang menghambat tenaga terampil memperoleh sertifikasi kompetensi adalah biaya dalam memperoleh sertifikasi kompetensi kerja.

Kata kunci: sertifikasi kompetensi, tenaga terampil konstruksi

Abstract

The purpose of competency certification is to provide recognition of the competencies possessed by the workforce. However, in the construction sector, construction workers who already have work competency certificates are still small compared to the total number of construction workers in Indonesia

This study aims to determine the main factors that hinder the acquisition of competency certification in the perspective of construction workers, especially skilled workers. This study uses a quantitative model with descriptive analysis. This research was carried out in three high-level building projects, with 129 respondents. The research design used in the form of surveys with data collection methods through questionnaires, observation, and literature study. The results of this study indicate that the dominant factor that inhibits skilled workers obtaining competency certification is the cost of gaining work competency certification.

Keywords: competency certification, construction workers

PENDAHULUAN

Hadirnya pasar global di Indonesia akan berpengaruh kepada daya serap para pekerja di negeri ini. Dengan adanya fenomena tersebut diharapkan para pekerja konstruksi di Indonesia memiliki daya produktifitas serta keterampilan yang baik disertai dengan bukti yang kuat berupa sertifikat kompetensi kerja agar dapat diakui oleh pengguna jasa konstruksi.

Kegiatan sertifikasi bertujuan agar tenaga kerja yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya tenaga kerja tingkatan tenaga terampil atau yang dikenal sebagai tukang yang bekerja di jasa konstruksi memiliki pengakuan yang sah atas kompetensi yang dimilikinya. (KepMen NaKerTrans Nomor 31 Tahun 2014) Pengakuan ini berupa sertifikat kompetensi kerja (Kusantati, 2012), (Mulyono & Haryanto, 2012). Maka seharusnya tenaga kerja konstruksi wajib mengikuti kegiatan tersebut (UU Nomor 2 tahun 2017). Namun kenyataan di lapangan belum dilaksanakan sepenuhnya. Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanudin mengatakan, baru sekitar 10% atau 740.000 tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi dari 7,4 juta tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia. Padahal pemerintah menargetkan minimal jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi di Indonesia dapat mencapai minimal 3 juta orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih minimnya tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sebagai awal dari penelitian ini, dilakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai bagian pengawas lapangan pada suatu proyek bangunan tinggi. Dari survei pendahuluan tersebut didapatkan fakta bahwa seluruh tenaga terampil yang jumlahnya berkisar 100 orang, belum memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Untuk mengetahui penyebab minimnya jumlah tenaga terampil yang bersertifikat kompetensi maka perlu diketahui faktor utama yang menghambat dalam perolehan sertifikasi. Faktor penghambat ini ditinjau dari pandangan atau persepsi dari tenaga terampil selaku obyek dari kegiatan sertifikasi kompetensi kerja. Dengan diketahui faktor penghambat ini,

diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengatasi minimnya tenaga terampil yang mempunyai sertifikasi kompetensi kerja.

Penelitian ini dilakukan kepada tenaga terampil pada tiga proyek bangunan tingkat tinggi. Penelitian dilakukan di proyek bangunan tingkat tinggi karena tenaga terampil menjadi ujung tombak dari pelaksanaan pada proyek bangunan tingkat tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan model kuantitatif dengan analisis deskriptif. Rancangan penelitian yang digunakan dalam bentuk survey dengan metode pengumpulan data melalui kuisioner, observasi, dan studi kepustakaan. Data dan informasi yang akan dikumpulkan berupa data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/ *scoring* (Sugiyono, 2015). Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan yaitu *Sampling Insidental*. Teknik penentuan sampel ini untuk menentukan sampel dari populasi berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan /insidental bertemu pada saat penelitian berlangsung dapat dijadikan sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2015) Dalam hal ini sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data penelitian adalah tenaga terampil pada proyek bangunan tingkat tinggi, dengan jumlah responden 129 orang.

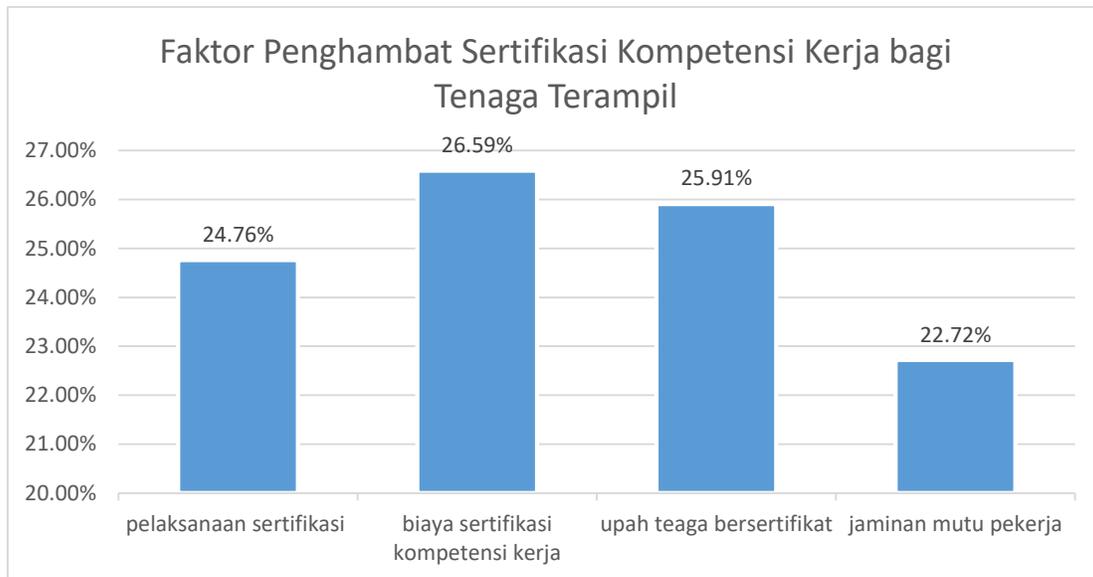
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2015).

Pada penelitian ini analisis statistik deskriptif yang akan dilakukan adalah menjabarkan hasil data yang telah diolah dan berupa persentase. Hasil persentase digunakan untuk memberikan jawaban atas kategori dari aspek-aspek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di tiga proyek bangunan tingkat tinggi. Responden yang didapat pada masing-masing proyek adalah proyek A dengan jumlah responden 79 orang, proyek B dengan jumlah responden 25 orang di tabel 4.2 dan proyek C dengan jumlah responden 25 orang.

Pada penelitian ini persepsi responden diukur melalui empat indikator, yaitu pelaksanaan sertifikasi, biaya sertifikasi kompetensi kerja, upah tenaga bersertifikat dan jaminan mutu kerja.



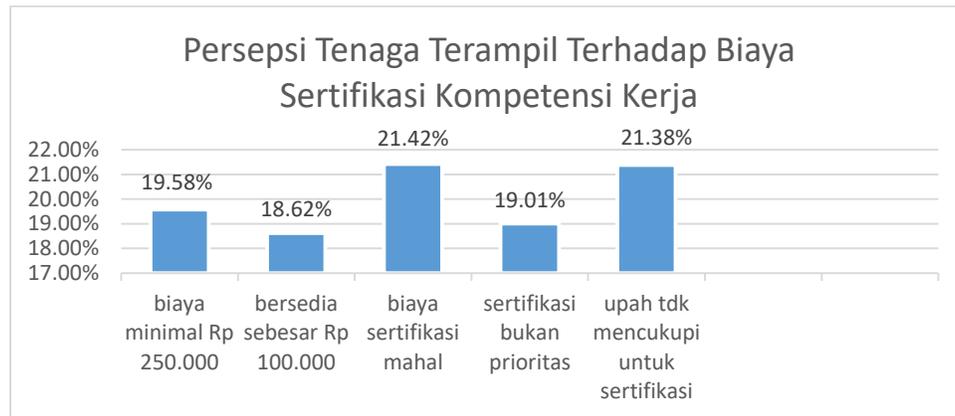
Gambar 1. Faktor penghambat sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga terampil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat yang paling dominan untuk tenaga terampil pada bangunan tingkat tinggi dalam memperoleh sertifikasi kompetensi kerja adalah pada indikator biaya sertifikasi kompetensi kerja. Hal itu dibuktikan dari skor persentase indikator yang mendapatkan angka sebesar 26,59% (Gambar 1).

Mayoritas reponden merasa keberatan dengan biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 250.000 sehingga reponden enggan untuk melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adi & Adillah (2012), yaitu biaya sertifikasi masih dianggap terlalu mahal.

Indikator biaya sertifikasi indikator biaya sertifikasi dijabarkan menjadi instrumen operasional yaitu persepsi tenaga kerja terampil sebagai berikut: a) bersedia melaksanakan sertifikasi dengan biaya yang telah ditetapkan

pemerintah yaitu Rp 250.000; b) bersedia melaksanakan sertifikasi dengan biaya Rp 100.000 c). Biaya pembuatan sertifikasi yang ditetapkan terlalu mahal d) Adanya keperluan biaya lain yang harus diprioritaskan terlebih dahulu selain sertifikasi; e) Upah sebulan bekerja tidak mencukupi untuk membayar biaya sertifikasi.



bar 2. Persepsi Tenaga Terampil Terhadap Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja

Hasil penelitian untuk persepsi tenaga terampil terhadap biaya sertifikasi kompetensi kerja dapat dilihat pada Gambar 2. Terlihat bahwa biaya minimal untuk membuat sertifikat kompetensi kerja yang ditetapkan oleh LPJK selaku badan yang mengurus kegiatan sertifikasi dianggap masih terlalu mahal oleh responden. Responden sangat setuju jika biaya pembuatan sertifikat kompetensi kerja dibawah harga yang ditetapkan oleh LPJK atau sebesar Rp 100.000. Responden masih memiliki kemampuan untuk membayar sertifikasi jika besaran yang ditawarkan sebesar Rp 100.000

Faktor lain yang menyebabkan tenaga terampil enggan membuat sertifikat kompetensi kerja adalah upah yang dihasilkan responden tidak mencukupi untuk membayar kegiatan sertifikasi yang telah ditetapkan sebesar Rp 250.000. Upah yang dihasilkan responden pada umumnya akan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu responden juga menganggap jika sertifikat kompetensi kerja saat ini adalah belum menjadi prioritas yang harus dipenuhi oleh responden.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan tenaga terampil memiliki persepsi yang kurang baik terhadap sertifikasi kompetensi kerja. Tenaga terampil menganggap bahwa biaya sertifikasi terlalu mahal. Hal ini menjadi faktor dominan

tenaga terampil enggan mengikuti sertifikasi kompetensi kerja. Dari segi upah yang diberikan juga tidak berpatokan kepada kepemilikan sertifikasi melainkan lebih berpatokan kepada hasil pekerjaan tukang dan pengalaman yang dimiliki tukang bangunan itu sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Jika ada, ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana atau telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. P., & Adillah, S. U. (2012). Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur. In Semarang (Ed.), *Seminar Nasional Fakultas Teknik Unissula* (p.). Fakultas Teknik Unissula.
- Kusantati, H. (2012). Alternatif Pengembangan Model Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Guru SMK. In *Seminar Internasional APTEKINDO 6, Peran LPTK dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia* (pp. 291–298). Makasar: FT Universitas Negeri Makasar.
- Mulyono, & Haryanto, A. T. (2012). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Boyolali. *Transformasi*, 51–57.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penellitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Sufina, Meri. (2017). Persepsi Badan Usaha Jasa Konstruksi terhadap Kompetensi dan Sikap Lulusan SMK Jurusan bangunan dalam Mengisi Lapangan Kerja pada Jasa Konstruksi di Kota Padang. *Jurnal Teknologi*, 7(1):94-100.
- Toreh, Rien Yolanda. R.; & Wiguna, I Putu Artama. 2015. Perbandingan Peforma Pekerja Konstruksi Dengan dan Tanpa Sertifikat Pelatihan. [Prosiding] Seminar Nasional Manajemen Teknologi 23 Program Studi Magister Teknik Sipil; Surabaya, 1 Agustus 2015. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Widiasanti I, Tamin, R. Z. and Haryanto, D. “Analisa Kompetensi Kerja Mandor dan Tukang Berdasarkan Persyaratan Jabatan Kerja dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,” *Seminar Nasional IX - 2013 Teknik Sipil ITS Surabaya*, 2013.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang *Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi*.
- Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang *Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil*.